

Lebanon: Legitimasi dan Kompetisi *Lebanese Armed Forces* Versus Hizbullah

Arfan Johan Wihananto, Yon Machmudi

Prodi Wilayah Kajian Timur Tengah dan Islam

Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

e-mail: fansjoe034@gmail.com, machmudi@ui.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the efforts of the Lebanese government to position the Lebanese Armed Forces (LAF) as the primary defence force in ensuring the country's sovereignty. The LAF, as a regular military institution, competes with the power of Hezbollah, so that this phenomenon becomes a challenge for the Lebanese government domestically and internationally in fighting for public legitimacy, apart from issues of collusion and dependence on the existence of internal actors and external interventions. This article also provides recommendations for solutions based on observations during the author's assignment to Operation World Peace in Lebanon (UNIFIL) in 2010 and 2018. This article is expected to contribute to the development of empirical and academic literature on the political situation in Lebanon. It also offers lessons from a country with a heterogeneous demographic background faced with conflict and power dynamics.

Keywords: *competition, Hizbullah, Lebanese Armed Forces, Lebanon, legitimization*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Lebanon untuk memposisikan *Lebanese Armed Forces* (LAF) sebagai kekuatan pertahanan utama dalam menjamin kedaulatan negara. LAF sebagai institusi militer reguler berkompetisi dengan kekuatan Hizbullah, sehingga fenomena tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Lebanon secara domestik dan internasional dalam memperebutkan legitimasi publik, terlepas dari isu-isu kolusi dan dependensi terhadap eksistensi aktor internal maupun intervensi eksternal. Artikel ini juga memberikan rekomendasi solusi yang didasarkan pada hasil observasi selama penulis menjalani penugasan Operasi Perdamaian Dunia di Lebanon (UNIFIL) pada 2010 dan 2018. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan empiris dan literatur secara akademis tentang situasi politik di Lebanon dan memberikan *lesson learned* atas kehidupan bernegara dengan latar belakang konfigurasi demografi yang heterogen, dihadapkan pada dinamika konflik dan kekuasaan.

Kata Kunci: Hizbullah, kompetisi, *Lebanese Armed Forces*, Lebanon, legitimasi

Pendahuluan

Lebanon merupakan negara di Timur Tengah dengan konflik dan temperamen politik yang tinggi, sehingga aspek kekuatan militer menjadi prioritas utama bagi ketahanan nasional negara. Lebanon juga dilanda pertikaian sektarian yang mengakar dalam struktur politik dan sosial ekonomi negara (Mansour-ille, 2021) dan kondisi ini memperkeruh persetujuan di sepanjang perbatasan dengan Israel dan berpengaruh pada keseimbangan stabilitas politik dan keamanan. Di Lebanon terdapat dua kekuatan militer yang berimbang, yaitu tentara nasional atau *Lebanese Armed Forces* (LAF) dan milisi Hizbullah. LAF sebagai institusi militer reguler pada prakteknya berada dalam spektrum yang sama dan berkompetisi dengan kekuatan militer Hizbullah, mengambil peran dan simpati domestik serta mempertahankan otoritas dalam dinamika konflik (Nerguzian, 2018).

Adanya kompetisi di antara kedua kekuatan tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang konflik di Lebanon tidak lepas dari intervensi Barat dan internasional dalam berbagai persaingan kepentingan (Muttaqin, 2018). Perancis menjadi kolonialis terakhir selama 23 tahun, bahkan kebudayaan dan tradisinya telah mengakar hingga bahasa Perancis didaulat sebagai bahasa kedua setelah Arab (Sicca S. P., 2020b). Konflik-konflik besar yang melibatkan Lebanon, mulai perang Israel-Liga Arab (1948), Perang Yom Kipur (1973), invasi Israel ke Lebanon (1982) dan perang saudara (1975-1990) selalu terkait dengan *national interest* negara Barat melawan Arab dan koalisinya. Momentum *Post Syrian War* dan penarikan militer Suriah dari Lebanon (2005), perang 34 hari di perbatasan Israel-Lebanon (2006), pertempuran melawan milisi *Fatah al Islam* di kamp pengungsi Palestina (2007), kontribusi dalam konflik di Suriah (2011) dan *counter operation* terhadap kampanye ISIS (2018) menjadi medan pembuktian eksistensi serta kapabilitas bagi LAF dan Hizbullah.

Hizbullah dari kekuatan milisi bertransisi menjadi organisasi berbasis ideologi agama dan kekuatan politik serta militer bahkan menjadi jawara dalam konstelasi politik di Lebanon pada tahun 2018 (Jayakarta, 2020). Keberhasilan menjadikan Hizbullah sebagai kekuatan dominan yang berpengaruh terhadap konfigurasi demografi dalam kehidupan *civil society*, parlemen dan kebijakan politik di Lebanon, sekaligus merupakan pukulan bagi AS, Uni Eropa, Israel, dan negara Arab pro-Barat. Fenomena tersebut menjadi pemicu kerawanan baru berupa gesekan antara dua kekuatan internal, perebutan pengaruh, legitimasi dan kompetisi antara LAF dengan Hizbullah yang berujung pada dualisme aktor militer dalam mengelola stabilitas politik dan keamanan Lebanon. Dualisme ini terus berlangsung hingga kini karena tidak ada institusi termasuk LAF yang memilih

berkonfrontasi terbuka dengan Hizbullah dengan segala kredibilitas domestik dan pengikut yang dimilikinya (Nerguzian, 2018).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait legitimasi militer di Lebanon, antara lain Malaeb (2018) menyebutkan bahwa negara (Lebanon) tidak pernah berhasil memonopoli penggunaan kekuatan yang sah dalam militer dan polisi yang dikendalikan negara. Kemudian dijelaskan juga bahwa eksistensi militer yang tidak memperoleh legitimasi masyarakat, kelompok politik, dan milisi, merupakan ancaman signifikan terhadap legitimasi negara. Namun demikian, hasil penelitian tersebut tidak mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah Lebanon dalam penguatan militer regulernya (LAF) dan akses dari kompetisi militer antara kapabilitas LAF *vis a vis* kekuatan Hizbullah terhadap legitimasi rakyat.

Sementara itu, Baylouny (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa militer yang terintegrasi tidak dapat dengan sendirinya menciptakan persatuan nasional atau membangun negara, namun bangunan negara dan persatuan nasional menjadi terhambat tanpa adanya militer yang dihormati dan representatif. Jika militer Lebanon terpecah menurut garis sektarian, sangat mungkin terjadi perselisihan sektarian atau perang saudara baru, karena tentara nasional merupakan pilar pengaman bagi negara. Namun, dalam penelitian tersebut penulis tidak menjelaskan bagaimana pilar LAF sebagai militer nasional Lebanon perlu dibangun secara representatif dan memperoleh legitimasi sebagai wujud penghormatan dari *civil society*, sekaligus mampu eksis sebagai simbol persatuan nasional dan tidak terpengaruh oleh politik praktis serta konflik sektarian.

Melanjutkan berbagai penelitian sebelumnya, artikel ini akan menjawab pertanyaan, bagaimana upaya pemerintah Lebanon untuk melegitimasi *Lebanese Armed Forces* (LAF) menjadi kekuatan pertahanan utama dalam menjamin kedaulatan negara, lepas dari bayang-bayang dan isu ketergantungan dari Hizbullah. Dalam riset ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif berupa studi literatur berdasarkan telaah dokumen, laporan resmi dan studi empiris selama penugasan sebagai Pasukan Perdamaian Dunia (UNIFIL) di Lebanon pada tahun 2010 dan 2018. Data dan fakta yang diperoleh dianalisa secara kualitatif mulai dari teknik pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Penulisan artikel ini dibagi dalam beberapa sub judul, yaitu legitimasi dan kompetisi, bagaimana kompleksitas internal yang terjadi di Lebanon, delegitimasi LAF dan kekuatan Hizbullah, kompleksitas internal Lebanon, komparasi kekuatan militer LAF dan Hizbullah, upaya pemerintah Lebanon dan politik kompromistis, rekomendasi dalam menjawab tantangan legitimasi LAF, dan kesimpulan.

Legitimasi dan Kompetisi

Legitimasi dalam sistem politik diartikan sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi merupakan bagian dari kewenangan, dan kewenangan adalah bagian dari kekuasaan (Aragon, 2008). Krisis legitimasi dapat terjadi karena persaingan yang tajam dan tidak sehat, atau tidak disalurkan pada prosedur yang berlaku sehingga menimbulkan perpecahan dalam pemerintahan. Konsekuensi dari adanya legitimasi adalah dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dipercayakan kepada penerima legitimasi tersebut dengan baik. Menurut Hermawan (2001), salah satu cara memperoleh legitimasi masyarakat adalah secara simbolis, artinya legitimasi diperoleh dengan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi dan kepercayaan yang dapat dilakukan secara ritualistik, sakral, retorik.

Konsep militer dalam suatu negara menurut Sayidiman Suryohadiprojo, diartikan sebagai organisasi bersenjata yang bertugas didalam menjaga kedaulatan negara (Bakrie, 2007). Sedangkan Perlmutter (2000) menjelaskan tentang organisasi militer dimana terdapat beberapa jenis orientasi militer dalam sebuah negara, di antaranya adalah: prajurit profesional, prajurit pretorian dan prajurit revolusioner. Organisasi militer digambarkan sebagai kekuatan militer yang terstruktur dan terencana serta cenderung dimiliki oleh sebuah negara maupun penguasa. Menjamin kedaulatan dan keamanan wilayah, serta membangun kekuatan pertahanan negara yang mumpuni dan *legitimate* menjadi tugas dan tanggung jawab negara dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Kompetisi diartikan sebagai bagian dari konflik yang terjadi karena perjuangan individu atau kelompok untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, untuk memperoleh keuntungan dan menundukkan saingannya (Anoraga & Suyanti, 1995). Goertz dan Diehl memandang konsep kompetisi sebagai hubungan atau interaksi militer dua aktor dalam waktu tertentu (Goertz & Diehl, 2001) dan interaksi tersebut merupakan bagian dari memperjuangkan kebijakan luar negeri dalam beberapa isu seperti perdagangan dan teritori. Sedangkan menurut Valeriano (2003), kompetisi dapat diidentifikasi sebagai bentuk pengulangan konflik berkepanjangan dengan dua aktor atau lebih yang bersaing dalam isu yang bervariasi. Rumusan tiga asumsi menuju kompetisi antara lain kompetisi militer, partisipasi antar negara dan menganut perpektif realis (Valeriano, 2003).

Kompleksitas Internal di Lebanon

Sejak merdeka dan menjadi negara berdaulat pada 22 November 1943, Lebanon terbagi dalam beragam partai politik yang merepresentasikan sekte/agama dan komunitas

dengan persentase yang tidak merata. Kristen dan Islam (Syiah dan Sunni) menjadi basis terbesar partai-partai politik (Dewi & Ulum, 2018), sedangkan *background* liberal, sosialis dan beberapa komunitas lain merupakan minoritas bahkan tidak memiliki perwakilan dalam parlemen. Berikut ini nama-nama partai-partai yang berideologi agama di Lebanon. Gerakan Patriotik Kebebasan, Partai Falangis, Blok Nasional dan Partai Liberal Nasional menjadi basis massa Kristen. *Amal Movement* dan *Hizbullah* adalah partai-partai dari komunitas Syiah, sedangkan PSP (Partai Sosialis Progresif) mewakili kelompok Druze. Partai berbasis muslim Sunni diwakili oleh *Hizbut Tahrir*, *Future Movement*, organisasi Nasseris Independen, Al-Tauhid, dan Ahabash. Terdapat juga cabang partai sekuler pan-Arab (Partai Ba'ath, sosialis, dan komunis) (Syakir, 2019).

Empat sekte dominan di Lebanon, yaitu Kristen Maronite, Syiah, Sunni, dan Druze selalu berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan yang sering berujung pada konflik berdarah. Hal ini dipengaruhi oleh terbentuknya kesepakatan “Pakta Nasional” era kolonialisme Perancis, yang berisi kesepakatan penentuan pejabat eksekutif dalam pemerintahan di Lebanon dimana presiden harus berasal dari golongan Maronite, perdana menteri dari kelompok Sunni dan ketua parlemen merupakan representasi Syiah (Humud, 2020). Konvensi yang mendapat dukungan dari golongan Maronite dan para pimpinan Sunni ini dibuat berdasarkan sensus pada tahun 1932 sekaligus secara tidak langsung merupakan legalisasi pembagian masyarakat Lebanon berdasarkan latar belakang agama (Syakir, 2019).

Dalam perkembangannya, kelompok Muslim menuntut kekuasaan lebih karena faktanya perkembangan komunitas mereka yang lebih banyak dari Kristen, dipicu oleh eksodus pengungsi Palestina pasca Perang Arab-Israel tahun 1956, 1967 dan 1973 (Sharif, 2020). Di sisi lain, Kristen Maronite yang selama masa kolonialisme Perancis dianakemaskan memiliki kelebihan dalam aspek ekonomi dan pendidikan hingga menjadi kekuatan politik yang dominan di Lebanon. Posisi ini terbukti telah berkontribusi terhadap kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi antar golongan, dimana kaum Muslim seolah menjadi komunitas yang termarginalkan (Baladi, 2018). Rangkaian Perang Sipil (1975-1990) adalah babak berikutnya telah mengubah peta kekuatan partai politik. Pada masa ini, muncul *nonstate actors* baru, seperti Partai Amal dan Hizbullah (Robinson, 2020).

Kesepakatan *Taif Accord* pada tanggal 22 Oktober 1989 di Saudi Arabia menjadi *milestone* yang menghentikan era panjang perang saudara. Dalam perjanjian Taif itu, ada kesepakatan penting mengenai kepemimpinan Lebanon, yaitu bahwa presiden akan terus dijabat oleh kaum Kristen Maronit sesuai Pakta Nasional 1943, tetapi kekuasaannya akan dibatasi. Selain itu, perdana menteri akan dipilih oleh parlemen (bukan lagi oleh presiden) dalam rangka meminimalisasi dominasi Kristen Maronit terhadap Muslim (Hibatullah, 2021). Perkembangan penting selanjutnya adalah penarikan mundur tentara Suriah dari Lebanon pada 2005. Ketidakmampuan pemerintah Lebanon dalam mengelola perdamaian dan keamanan ditandai pecahnya Perang 34 hari pada Juli 2006 yang memanaskan kembali

konflik dengan Israel dan memunculkan Hizbullah sebagai kekuatan baru melebihi kekuatan tempur LAF dalam hal alutsista maupun militansi prajuritnya menghadapi resistensi *Israel Defence Force* (IDF) sekaligus menandai masuknya UNIFIL ke Lebanon (Haddad, 2021).

Komparasi Kekuatan Militer LAF dan Hizbullah

Aspek militer menjadi indikator ketahanan nasional suatu bangsa, apalagi untuk negara dengan temperamen politik yang tinggi seperti Lebanon. Militer Lebanon juga banyak mendapat suntikan finansial dari AS dengan total rata-rata USD75 juta per tahun. Sejak 2006, AS telah memberikan donasi lebih dari USD 2 milyar kepada LAF untuk alutsista militer, senjata, perlengkapan dan latihan (Humud, 2020). Program dukungan kepada LAF seperti yang dilakukan oleh negara dan rakyat AS selama operasi “*Dawn of The Jurds*” juga bertujuan untuk memperkuat legitimasi militer LAF secara domestik maupun internasional (Nerguizian, 2017).

Dalam tabel berikut ini terlihat bahwa pengeluaran anggaran untuk kepentingan militer Lebanon pada tahun 2019 sangat kecil. Pengeluaran pemerintah Lebanon untuk militer tertinggi berada di angka USD 2606.00 dari total pendapatan pemerintah USD 1191468.00 (0.2%) dari pendapatan pada tahun 2019 (Economics, 2019). Hal ini menjadi satu fakta bahwa pengembangan kekuatan militer belum menjadi prioritas kepentingan nasional pemerintah Lebanon, meskipun dihadapkan dengan konflik di perbatasan dengan Israel dan kompetisi dengan kekuatan *Hizbullah* secara internal.

Tabel 1. Anggaran Militer Lebanon Tahun 2019

No	LEBANON	TERAKHIR	TERTINGGI	TERENDAH	SATUAN
1	APBN	-11.40	-5.92	-11.40	% dari PDB
2	Belanja Pemerintah	13792.71	13792.71	1671.52	Lbp-Miliar
3	Pendapatan Pemerintah	1191468.00	2658114.00	174236.00	Lbp-Juta
4	Belanja Fiskal	1187729.00	2797788.00	239680.00	Lbp – Juta
5	Pengeluaran Militer	2606.00	2686.00	265.00	USD-Juta

Sumber: *tradingeconomics.com* (2019)

Menurut data dari globalfirepower.com (2001), struktur organisasi militer Lebanon terdiri dari 75.000 personel aktif namun kekuatan alutsistanya tidak memberikan *balance of power* dibandingkan kompetitornya di Timur Tengah. Peralatan tempur LAF mayoritas merupakan peninggalan Perang Dunia II, 85% buatan AS, Perancis, Inggris dan Uni Soviet berstatus hibah, seperti Rantis Humvee M1035, Tank M113 dan VAB milik Perancis bekas misi UNIFIL yang akan diregenerasi (Andika, 2018). Dalam aspek Alutsista, militer reguler Lebanon ini hanya memiliki 366 tank, 2.228 kendaraan tempur, 386 senjata artileri, 30 roket dan 64 helikopter, serta 13 kapal. Adanya konflik Lebanon-Israel, telah memunculkan persepsi adanya interdependensi militer Lebanon dan Hizbullah yang memiliki ribuan milisi bersenjata, jaringan pelayan sosial yang luas dan diprediksi memiliki anggaran USD 100 juta per tahun (Endarti, 2020).

Tabel 2. Kekuatan Militer LAF

No	Unit	Types				
1	Land Forces	Tank (366)	Armored vehicles (2.228)	Self Propeled Arty (12)	Towe d Arty (374)	Rocket Projector (30)
2	Air Forces	Dedicated attack (9)	Hellycopter(5)			
3	Naval Forces	Patrol Shipp(13)				
	Total Military Personnels					75.000

Sumber: globalfirepower.com (2001)

Sebagai kekuatan militer reguler, LAF bertanggung jawab terhadap isu keamanan nasional di Lebanon, namun implementasinya sering berada di balik bayang-bayang Hizbullah dalam mengeksekusi konflik dan ancaman domestik (Orion, 2019). Faktanya, tanpa mengesampingkan performa operasional, kapabilitas LAF sangat terbatas untuk mampu menempatkan diri sebagai institusi militer yang *legitimate* dan subyek utama dalam isu-isu keamanan di Lebanon tanpa berinteraksi langsung dengan Hizbullah (Karabatak, 2019).

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Lebanon meminta kehadiran pasukan perdamaian (UNIFIL) melalui Dewan Keamanan PBB pasca-Perang 34 hari tahun 2006. UNIFIL telah hadir di Lebanon sejak tahun 1978 dengan tujuan memastikan penarikan mundur tentara Israel dari Lebanon selatan serta meningkatkan dan memperluas dominasi LAF di kawasan tersebut (yang saat itu telah merupakan basis Hizbullah). Pada tahun 2006,

salah satu tugas pokok UNIFIL sesuai UNSCR No. 1701 adalah: “Mendorong peningkatan peran dan fungsi LAF (Humud, 2020). Namun realitanya instrumen militer LAF tidak mampu menjamin *freedom of movement* bagi pasukan UNIFIL di dalam area operasi akibat intervensi dan pembatasan dari komunitas lokal, yaitu Hizbullah.

Ketidakberdayaan militer Lebanon dalam meningkatkan kekuatan, berdampak pada ketidakmampuan dalam mengimbangi agenda program bersama UNIFIL. Akibatnya terjadi perlambatan proses kemandirian LAF untuk siap menjadi garda nasional serta perimeter pengaman di sepanjang perbatasan dan area konflik (Nerguizian, 2021). Selain itu, ada satu poin penting dalam tugas pokok UNIFIL sesuai resolusi DK PBB No 1701 yang sampai saat ini tidak terlaksana, yaitu “meyakinkan daerah operasi bebas dari senjata ilegal” (Fabi, 2020) sehingga menjadi pertanyaan dunia internasional dan raport merah bagi kinerja Pasukan Perdamaian. Dalam pandangan PBB, seluruh senjata yang berada di dalam area operasi, selain milik pasukan UNIFIL, militer reguler Lebanon (LAF) dan Kepolisian Lebanon (*Internal Security Force/ISF*) adalah ilegal, termasuk persenjataan Hizbullah.

Pada operasi kontra kampanye ISIS tahun 2018 “*Dawn of the Jurds*” performa LAF di garis depan perbatasan Suriah-Lebanon dianggap mampu menjadi indikator yang merefleksikan profesionalisme, sekaligus opsi yang layak menjadi institusi pengamanan negara, bukan Hizbullah (Nerguizian, 2017). Akan tetapi, faktanya LAF juga diuntungkan dengan peran Hizbullah dalam penarikan mundur ISIS dari perbatasan, ditandai dengan tercapainya kesepakatan secara sepihak antara Hizbullah dengan ISIS untuk menarik mundur milisinya dari Lebanon. Terkondisikannya LAF sebagai kekuatan aliansi secara politis, telah menempatkan pemerintah Lebanon pada satu-satunya alternatif yang harus diambil untuk membentuk postur militer yang profesional, membangun narasi positif dan legitimasi masyarakat dalam statusnya sebagai kekuatan militer utama, lepas dari bayang-bayang dan isu kolusi dengan Hizbullah.

Sebelum kemunculan Hizbullah, kaum Muslim Syiah Lebanon bergabung dalam Partai Amal yang didirikan oleh Musa Sadr pada tahun 1974. Setelah Israel menginvasi Lebanon, kaum Muslim Syiah di kawasan itu membentuk partai tersendiri, terpisah dari Partai Amal yang dianggap terlalu lunak dalam konfrontasi melawan Israel. Hizbullah mendapatkan bantuan dari Iran, yang saat itu baru saja beralih dari monarkhi menjadi Republik Islam dengan sistem *velayat el faqih* (sistem negara yang dipimpin para ulama). Sebaliknya, Amal, meskipun bermazhab Syiah, tidak menerima sistem tersebut dan tidak berafiliasi dengan Iran. Hizbullah menggunakan pendekatan agama untuk mempresentasikan diri sebagai partai politik yang progresif dan pragmatis namun fleksibel dalam pengambilan keputusan di lingkup domestik dan regional secara adaptif (Farida, 2018).

Kekuatan personel Hizbullah adalah milisi-milisi yang terdoktrin kuat, terlatih dan teruji dalam berbagai spektrum konflik sejak pecah perang saudara di Lebanon tahun 1975 hingga fenomena Arab Spring dan *counter operation* melawan ISIS di Timur Tengah tahun 2018. *Man power* mereka mencapai 45.000 orang, dengan pejuang elitnya (*Radwan Force*)

sekitar 2.500 orang dan jumlah misil, roket serta mortir antara 100.000 -150.000, terdiri dari ribuan misil jarak dekat (di atas 40 km) dan jarak menengah (200-700 km) termasuk ratusan misil jarak jauh (200-700 km), bahkan mengupgrade proyek persenjataan terbaru sekitar 20-200 misil dengan tingkat akurasi hingga 50 meter (Staff, 2020). Hizbullah juga memiliki berbagai macam misil darat ke laut jenis C-802 dan sistem Yakhont, ribuan misil anti tank dengan sistem generasi ketiga yang mampu melakukan penetrasi terhadap persenjataan militer Israel (IDF) dan alutsista Barat, serta misil anti serangan udara terbaru seperti SA-8, SA-17 dan SA-22.

Tabel 3. Kekuatan Militer Hizbullah (2016)

NO	TYPES	STRENGTH
1	<i>Fighters</i>	<i>45.000</i>
2	<i>Rockets</i> - <i>Short Range</i> - <i>Medium Range</i> - <i>Long Range</i>	- <i>Ten Thousands</i> - <i>Thousands</i> - <i>Hundreds</i>
3	<i>Rocket Stocpile</i>	<i>120.000-130.000</i>
4	<i>Drones</i>	<i>Hundreds</i>
5	<i>Surface to Sea Missile</i>	<i>Advance Yakhont Missile</i>
6	<i>Anti Tank Missile</i>	<i>Thousands</i>
7	<i>Anti Aircraft System</i>	<i>SA 22 Missiles</i>

Sumber: Harel & Cohen (2016)

Selain eksistensinya sebagai partai politik bersenjata di luar struktur angkatan perang yang dominan dalam menghadang resistensi Israel, Hizbullah juga mendapat simpati dari masyarakat dan diakui oleh pemerintah Lebanon sebagai simbol kekuatan perlawanan serta aset perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan negara (Dewi & Ulum, 2018). Bahkan sebagian komunitas sosial yang pesimis dengan profesionalisme LAF mengatakan bahwa LAF adalah aktor yang lemah dalam politik Lebanon yang bekerjasama atau tersusupi oleh pengaruh Hizbullah (Samaan, 2018). Suara partai ini meningkat sejak pemilu tahun 2005 dan 2009 serta mendapat simpati dari komunitas akar rumput melalui gerakan sosial-politik dan militer hingga menjadi jawara dalam konstelasi politik tahun 2018, menumbangkan status *quo* kaum Maronite secara konstitusional (Robinson, 2020).

Partai ini berkembang pesat, populasinya terus bertambah karena mampu merekrut kader dan melakukan indoktrinasi militan kepada generasi muda serta menancapkan pengaruhnya di setiap level lembaga masyarakat dalam perjuangan melawan Zionis (Citrinowicz, 2020). Hizbullah mengelola jaringan luas yang mencakup infrastruktur, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga program pemuda (Endarti, 2020), dengan pola aksi seperti: **pertama**, menggunakan kekuatan militer. Para pejuangnya merupakan kekuatan tersolid, dan terbesar melebihi kekuatan angkatan bersenjata Lebanon, LAF. **Kedua**, kekuatan politik. Dalam pemilu tahun 2018 perolehan kursi Hizbullah dengan partai-partai koalisi "March 8" di parlemen meningkat dari 44% menjadi 53%, serta disegani karena menjadi simbol partai anti korupsi (Humud, 2018). **Ketiga**, kekuatan media. Hizbullah memiliki jaringan TV satelit, Al Manar, yang menjangkau 10 juta massa dan mengelola radio serta website. **Keempat**, kekuatan sosial kemasyarakatan. Hizbullah memiliki lembaga penelitian untuk mengimplementasikan program kesejahteraan dan kegiatan sosial, seperti yayasan veteran, institusi medis, donasi sosial dan program konstruksi jihad. Mereka membangun 50 rumah sakit, 100 sekolah (Alishahi, 2020).

Respon Pemerintah Lebanon dan Politik Kompromistis

Pemerintah Lebanon sepertinya tidak menomorsatukan pemenuhan postur organisasi militernya akibat anggaran finansial negara yang terbatas atau memang terkondisikan oleh Amerika Serikat dan Eropa, sehingga Lebanon terjerat dalam ketergantungan dan tidak mempunyai nilai tawar untuk memaksakan konsep dan kebijakan politik negara. Bujet militer yang dianggarkan (0,2% dari pendapatan negara) (Economics, 2019) menjadi cermin ketidakseriusan pemerintah Lebanon dalam mengelola stabilitas keamanan wilayah. Inferioritas LAF membuatnya tidak mampu *head to head* melawan IDF dalam konflik di sepanjang *Blue Line*. Perang 34 hari (2006) justru membuktikan *Hizbullah* sebagai aktor utama (Aoun, 2019).

Ketidakmampuan pemerintah Lebanon dan LAF menjamin gerakan UNIFIL dalam mengeksekusi tugas pokoknya tentu menjadi dilematis, akibatnya beberapa agenda penting dalam tugas pokok tidak dapat terlaksana secara proporsional dan profesional (Haddad, 2021). Di sisi lain, pemerintah Lebanon juga tidak bisa memungkiri kekuatan Hizbullah sebagai tulang punggung negara dalam menghadapi tekanan Israel akibat performa LAF yang jauh dari ideal, baik dari kesiapan sumber daya manusia maupun kekuatan alutsista perangnya (Sarkis, 2020).

Pemerintah Lebanon lebih menggantungkan kekuatan dan militansi Hizbullah serta dukungan eksternal untuk menghadapi Israel, sehingga bisa mengalokasikan porsi anggaran negara untuk sektor lain atau justru dikorupsi oleh oknum pemerintahan sendiri (Sicca, 2020a). Hal ini secara sistematis berpengaruh pada reaksi masyarakat Lebanon yang merasakan keberadaan UNIFIL dari masa ke masa sebagai pasukan perdamaian PBB yang

labelnya *interim* (sementara), namun seolah tidak pernah ada rencana pengakhiran cerita meski sudah berumur lebih dari 40 tahun. Ketidakmampuan Lebanon bertransformasi sebagai sebuah negara yang berdaulat ini juga menjadi bukti kentalnya nuansa politik dalam konflik Lebanon-Israel atau justru menjadi bentuk kegagalan UNIFIL dalam mengemban kepercayaan dunia internasional (Feltman, 2020).

Respon terhadap fenomena dan realita terkait kondisi LAF dan Hizbullah memperlihatkan kebijakan “politik kompromistis” dari pemerintah Lebanon dalam mengelola konflik di sepanjang *Blue Line* yang berbatasan dengan Israel-Lebanon dan kawasan Timur Tengah (Luckham & Kirk, 2020). Di satu sisi LAF adalah kekuatan militer resmi dan seharusnya menjadi tulang punggung bagi stabilitas perdamaian dan keamanan negara yang independen, di sisi lain kekuatan militer Hizbullah jelas menjadi aset penting bagi pemerintah Lebanon dalam mengcounter resistensi Israel dan menutup lubang-lubang yang terdapat dalam institusi militer reguler mereka. Respon pemerintah Lebanon terhadap fenomena tersebut dapat dianalisis dalam implementasi kinerja pemerintah Lebanon, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, pemerintah Lebanon memanfaatkan *national interest* Amerika Serikat dan Eropa di kawasan Timur Tengah untuk mendorong peningkatan aspek sosial-ekonomi dan modernisasi alutsista militer. Amerika menjadikan Lebanon sebagai titik kontrol Barat terhadap kawasan Timur Tengah dan menghalau kebangkitan Islam (radikal) sebagai ancaman ideologis global (Setyowati, 2017). Lebanon juga dianggap paling netral dan lebih terbuka terhadap invasi Barat sehingga meski merupakan daerah konflik, negara-negara Eropa intens menjalin kerjasama dengan pemerintah Lebanon diikuti dengan masuknya investor (ceicdata.com, 2020).

Pemerintah Lebanon perlu mengelola dengan baik relasi dan bantuan finansial internasional, sehingga maraknya perbankan asing, puluhan rumah sakit modern dan sekolah/universitas internasional dapat menjadi stimulan bagi pergerakan roda ekonomi dan kemajuan kehidupan sosial masyarakat, sekaligus menekan rendahnya tingkat nasionalisme warga negara Lebanon hingga memilih tinggal di luar negeri akibat tidak stabilnya kondusifitas wilayah. Konsistennya hibah alutsista militer dari Amerika Serikat dan Eropa dapat menjadi *bargaining power* dalam rangka menata kekuatan militer Lebanon (*LAF*) yang lebih profesional dan modern, lepas dari dependensi maupun isu kolusi terhadap kekuatan *non state actor* (Hizbullah).

Kedua, pemerintah Lebanon mengoptimalkan eksistensi UNIFIL melalui program *Civil Military Coordination (CIMIC)* dalam bentuk *humanitarian assistance* serta donasi finansial dan pendampingan militer (Issa, 2020). Dua kegiatan utama dalam pola operasi UNIFIL diimplementasikan dalam bentuk aktivitas bersama antara *UN Peacekeepers* dan *LAF* berupa *Joint Patrol*, *Joint Excercise* dan *Joint Observation Post*, serta aktivitas CIMIC sebagai upaya menghilangkan trauma perang dan pemulihan aspek psikis serta psikologis masyarakat (Yonmek, 2018). LAF selalu dilibatkan dalam kedua bentuk program tersebut

sebagai salah satu upaya pembangunan nasional Lebanon secara fisik maupun non fisik, sehingga institusi militer tersebut juga perlu disiapkan dan *well equipped* agar secara bertahap dan kontinyu postur LAF terdorong kearah kemandirian yang profesional, tidak sekedar formalitas.

Orientasi program kegiatan *CIMIC* cenderung bergeser kepada upaya pemenuhan sarana dan perbaikan infrastruktur publik melalui pemberian donasi, penyediaan sarana pembangkit listrik (*genset*), perbaikan kantor desa (*Baladiyah*), pembangunan tower air, renovasi taman kota atau bahkan pengadaan lampu jalan dan tempat sampah umum. Keterlibatan LAF dalam program *CIMIC* juga menjadi media interaksi positif dan eksistensinya di tengah kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi militernya dalam membantu permasalahan mendasar yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat.

Ketiga, pemerintah Lebanon mengkonstruksikan LAF sebagai representasi dan *balance of power* bagi sekte-sekte dan kepentingan partai politik sekaligus memperoleh legitimasi publik secara domestik dan internasional sebagai institusi militer yang modern dan terpercaya (Nurgezian, 2017). Permasalahan sektarian telah menjadi isu yang mengakar dalam kehidupan sosio-kultural Lebanon, dominasi Hizbullah sebagai kekuatan politik dan militer partai Islam (Syiah) menjadi salah satu problema dalam mewujudkan nasionalisme dan persatuan. Presensi LAF yang legitimate merupakan solusi utama yang perlu menjadi prioritas bagi pemerintah Lebanon, karena statusnya sebagai institusi militer reguler sekaligus merupakan kekuatan nasional dan merepresentasikan latar heterogenitas masyarakat Lebanon dalam rangka mengikis ego sektoral yang membelenggu.

Keempat, pemerintah Lebanon mengkondisikan Hizbullah untuk berbagi peran dalam menghadapi konflik melawan Israel dan aktor antagonis terhadap UNIFIL, di sisi lain LAF secara substantif memperoleh manfaat dari sikap represif Hizbullah terhadap Israel (Samaan, 2018). Tidak bisa dipungkiri, Hizbullah secara internal menjadi aset penting bagi pemerintah Lebanon, kekuatan militernya masih superior dalam memberikan tekanan terhadap Israel dalam konflik di perbatasan dan sepanjang *Blue Line*. Ambiguitas sikap pemerintah Lebanon dalam penyelesaian konflik-konflik yang melibatkan UNIFIL dan Hizbullah, realitanya tidak pernah menempatkan partai Syiah ini sebagai pihak yang dituntut pertanggungjawabannya. Penyelesaian friksi yang terjadi selalu dikembalikan pada tuntutan sikap profesional dan imparisial UNIFIL, di sisi lain mendorong penghargaan terhadap tugas Pasukan Perdamaian PBB yang menghormati kedaulatan negara Lebanon (Yonmek, 2018).

Rekomendasi dalam Menjawab Tantangan Legitimasi LAF

Dalam rangka menjawab tantangan legitimasi LAF pada berbagai skala konflik, kontribusi LAF sering berada dalam posisi yang sulit. LAF bergantung kepada anggaran negara di tengah isu sektarian dan sistem politik *sharing of power* yang memberikan

peluang elit politik untuk lebih dominan terhadap kepentingan komunitasnya daripada kepentingan negara. Di sisi lain, muncul indikasi bahwa LAF telah berkoordinasi dengan Hizbullah dalam operasi *Dawn of the Jurds*, berakibat ancaman AS yang tidak akan memberikan dukungan kepada LAF apabila pemerintah Lebanon menjadikan Hizbullah yang diklaim teroris oleh AS sebagai partnernya (Bowman, 2020). Berkompetisi terbuka dengan Hizbullah untuk menjadi satu-satunya aktor militer juga bukan opsi terbaik bagi LAF saat ini, mengingat kokohnya dominasi partai Syiah di parlemen pasca kemenangan dalam konstelasi politik tahun 2018 dan dukungan Iran di belakang layar (Pour, 2020).

Untuk kepentingan stabilitas kawasan, khususnya problem di perbatasan dengan Israel, kekuatan dan militansi Hizbullah mampu memberikan *deterrence effect* bagi Israel (Bowman, 2020) sekaligus memprovokasi sikap imparsial pasukan UNIFIL dalam bentuk provokasi dan propaganda di lapangan. Mengkonstruksikan LAF yang profesional dan *legitimate* sebagai entitas yang notabene adalah angkatan perang reguler menjadi tanggung jawab pemerintah Lebanon. Membangun postur militer yang modern sebagai garda utama dalam menjamin stabilitas politik dan keamanan merupakan harga diri dan kehormatan pemerintah Lebanon dihadapan 10 jutaan warga negaranya, sekaligus instrumen yang merepresentasikan pluralitas demografi masyarakat Lebanon. LAF bukan hanya aktor militer, tapi produk kekuatan penyeimbang sekte-sekte di Lebanon (Samaan, 2018).

Upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas LAF dalam menjamin keamanan dan perdamaian di Lebanon di mata masyarakat perlu menjadi salah satu prioritas, sebagaimana tercantum dalam tugas pokok UNIFIL sesuai *United Nation Security Council Resolution (UNSCR)* No 1701 “mendorong peningkatan peran dan fungsi LAF...” (Humud, 2020). Pemerintah Lebanon harus mampu memanfaatkan domain tugas operasional UNIFIL tersebut dalam rangka memberikan porsi yang bersifat pendampingan guna mendorong peran LAF agar memiliki kemampuan operasional yang memadai dan mampu menyelenggarakan fungsi pengamanan secara mandiri melalui aktivitas yang tersinergi dengan program UNIFIL sesuai Resolusi 1701 (Fabi, 2020). Program-program konkrit pemerintah Lebanon yang dapat diambil di antaranya meliputi:

Pertama, menyusun prioritas jangka pendek, menengah dan panjang terkait kebutuhan alutsista untuk program menuju profesionalisme LAF yang berkelanjutan dihadapkan pada spektrum ancaman dan dinamika konflik khususnya di perbatasan Lebanon-Israel. Dinamika ini perlu disikapi oleh pemerintah Lebanon dengan menentukan kebijakan dan rencana strategis terkait penguatan LAF melalui pemenuhan sumber daya manusia, penguatan Alutsista militer khususnya satuan-satuan di perbatasan, serta kelengkapan sarana dan prasana infrastruktur bagi personel militernya.

Kedua, memperkuat kampanye militer dan publikasi LAF dalam rangka mempertegas simpati dan legitimasinya sampai ke tingkat akar rumput sebagai instrumen utama penegak stabilitas keamanan negara dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan operasional maupun *CIMIC* bersama *UNIFIL Peacekeepers*.

Ketiga, membangun diplomasi politik dan kerjasama militer dengan negara-negara di kawasan untuk membentuk postur LAF yang lebih profesional, latar belakang sejarah dan geografi Lebanon berpotensi untuk menjalin relasi yang erat, baik dengan komunitas Liga Arab maupun Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebagai bagian dari komunitas liga Arab, Lebanon perlu menjalin hubungan diplomasi politik dan kerjasama militer dengan negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, UEA dan negara-negara Timur Tengah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas LAF, meskipun superioritas *Hizbullah* dapat menjadi penghalangnya (Mroue, 2020).

Keempat, mengkonsolidasikan berbagai komunitas agama dan sekte dalam masyarakat menjadi satu kekuatan pemerintah dan negara yang berdaulat dan mandiri. LAF dapat menjadi representasi kehadiran negara dengan visi dan misi yang lebih nasionalis karena dibangun dari seluruh elemen dan latar belakang masyarakat Lebanon. Pemerintah Lebanon harus mampu mengkonstruksikan kekuatan LAF sebagai *leading sector* sekaligus simbol nasionalisme dalam komunitas masyarakat yang plural dan didominasi oleh Kristen Maronite, Islam Sunni dan Syiah serta Druze (Dewi & Ulum, 2018).

Simpulan

Eksistensi LAF dan Hizbullah telah menjadikan dualisme aktor militer dalam menjamin stabilitas keamanan negara dengan segala kepentingan negara-negara sponsor terhadap konflik di perbatasan Israel-Lebanon dan kawasan Timur-Tengah, di tengah komunitas masyarakat yang heterogen dan isu sektarian yang kental dengan unsur politis. Posisi LAF tidak cukup kuat sebagai institusi militer reguler dihadapkan dengan anggaran militer yang terbatas dan kompleksitas dinamika konflik di kawasan. LAF juga belum mampu mengoptimalkan eksistensi UNIFIL selama lebih dari 40 tahun untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas militernya. Di sisi lain, Hizbullah sedang menikmati dominasi politik di parlemen dan akar rumput serta kuatnya dukungan finansial sehingga manuver politik dan militansi personelnya mampu menarik simpati domestik. Dalam menyikapi dualisme aktor militer ini, pemerintah Lebanon terlihat melakukan upaya kompromistis.

Artikel ini memberikan argumen bahwa pemerintah Lebanon perlu memprioritaskan upaya untuk meningkatkan kapabilitas LAF sebagai institusi militer reguler melalui kebijakan politik luar negeri yang lebih pro-aktif baik terhadap Barat dan kawasan Timur Tengah serta jeli dalam mengelola eksistensi UNIFIL dan Hizbullah. Konsolidasi internal LAF melalui program-program berjangka, *military campaign* yang menyentuh langsung kepentingan publik dan komitmen menjadikan LAF sebagai simbol persatuan akan menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi rakyat, sekaligus memenangkan kompetisi tanpa konfrontasi melawan Hizbullah.

Daftar Pustaka

- Alishahi, A. dan Pour H. (2020). The Social and Cultural Functions of the Lebanese Hezbollah Movement; Its Roots and Achievements. *Journal of Cultural and Social Anthropology*. [Online]. Vol 2, 1-11. Dalam: <https://www.sryahwapublications.com/journal-of-cultural-and-social-anthropology/pdf/v2-i1/1.pdf> [Diakses 24 Mei 2021].
- Andika, D. (2018). Perancis serahkan 10 VAB Mephisto untuk Lebanon. *Jakartagreater*. [Online]. Dalam: <https://jakartagreater.com/213164/prancis-serahkan-10-vab-mephisto-untuk-lebanon/> [Diakses 25 Mei 2021].
- Anoraga, A. dan Suyati, S. (1995). *Psikologi industri & sosial* Jakarta : Pustaka Jaya.
- Aragón, J. (2008). *Political Legitimacy and Democracy*. [online] IUC. Dalam: https://is.muni.cz/el/1421/jaro2014/PH02103/material_politickafilosofie.pdf [Diakses 1 Agustus 2021].
- Aoun, E. (2019). Hezbollah: The Dominant Political Actor in Lebanon Limiting the Risk of Large-Scale Conflict. *Digital Acces To Scholarship at Harvard*. [Online]. Dalam: <https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/42004225/AOUN-DOCUMENT2019.pdf?isAllowed=y&sequence=1> [Diakses 26 Mei 2021].
- Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Nusantara.
- Baladi, S. (2018). *Polyglotism and Identity in Modern-Day Lebanon*. [Online] ejournals.bc.edu, 9611-Article%20Text-19645-1-10-20181108. Dalam: [Diakses 27 Mei 2021].
- Baylouny, A.M. (2012). Building an Integrated Military in Post-Conflict Societies: Lebanon. Dalam: T. Bruneau and C. Matei, ed., *Handbook on Civil-Military Relations*, New York: Routledge.
- Bowman, B. (2020). *Lebanese Armed Forces must act against Hezbollah to retain America's military aid*. [Online] Dalam <https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2020/04/01/lebanon-must-act-against-hezbollah-to-retain-americas-military-aid/> [Diakses 28 Mei 2021].
- Citrinowicz, D. (2020). Radicalization in the Service of the Revolution: Iran, Hezbollah, and the Shi'ite population in Europe. *European Eye on Radicalization*. [online]. Dalam: <https://eeradicalization.com/radicalization-revolution-iran-hezbollah-european-shiites-danny-vitrinowicz/> [Diakses 29 Mei 2021].
- Dewi, S. dan Ulum, R. (2018). *Penanganan paham gerakan Transnasional keagamaan di Pakistan Lebanon dan Brunai Darussalam*. Puslitabang Bimas Keagamaan dan layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI.

- Diehl, P.F. and Goertz, G. (2000). *War and Peace in International Rivalry*. Michigan: University of Michigan Press.
- Endarti. (2020). 6 Fakta Menarik Hizbullah, Partai Politik Sokongan Iran hingga Jadi Bagian Penting Pemerintah Lebanon. *Akurat.Co*, [Online]. Dalam: <https://akurat.co/6-fakta-menarik-hizbullah-partai-politik-sokongan-iran-hingga-jadi-bagian-penting-pemerintah-lebanon> [Diakses 2 Juni 2021].
- Fabi, A. (2020). UNIFIL: Evolution of a Peacekeeping Mandat. *The CoESPU MAGAZINE*, [Online] 2, 14. Dalam: DOI Code: 10.32048/Coespumagazine2.20.2 [Diakses 5 Juni 2021].
- Farida, M. (2018). Adopting religion to meet political goals: the case of Hizbullah. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*. [Online] 13(3), 316-331. Dalam: DOI: 10.1080/18335330.2018.1501158 [Diakses 7 Juni 2021].
- Feltman, J. (2020). *Order From Chaos: Debating UN peacekeeping in Lebanon*. [online] Brookings. Dalam: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/15/debating-un-peacekeeping-in-lebanon/> [Diakses 8 Juni 2021].
- Global Fire Power, (2021). *Lebanon Military Strenght*. [online] Dalam: https://www.globalfirepower.com/country-military-strenghtdetail.php?country_id=lebanon [Diakses 8 Juni 2021].
- Haddad, R. (2021). Hezbollah within and beyond Lebanon. *Orient II, German Journal for Politics, Economics and Culture of the Middle East*, [Online] 1-9. Dalam: [file:///C:/Users/hp/Downloads/Hezbollah_within_and_beyond_Lebanon%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/Hezbollah_within_and_beyond_Lebanon%20(1).pdf) [Diakses 11 Juni 2021].
- Harel, A & Cohen, G. (2016). *From Terror Group to Army*. [online] Haaretz. Dalam: <https://www.haaretz.com/st/c/prod/eng/2016/07/lebanon2/> [Diakses 8 Juni 2021].
- Hibatullah, F. (2021). Lebanese Confessionalism Politics. *Jurnal ICMES*, [online] 5(1), 69-87. Dalam: <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.103> [Diakses 5 Juli 2021].
- Humud, E. (2018). *Lebanon's 2018 Elections*. [Online] CRS Insight. Dalam: <https://fas.org/sgp/crs/mideast/IN10900.pdf> [Diakses 11 Juni 2021].
- Humud, E. (2020) *Lebanon*. [Online] CSR Report. Dalam: <https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44759.pdf> [Diakses 11 Juni 2021].
- Issa, A. (2020). *European Contribution to UNIFIL: Towards a Better Local Integration*. [Online] Sine Qua Non Think Tank. Dalam: https://www.sinequanon-eu.com/wp-content/uploads/2020/05/SQNPolicy-BriefMay20_UNIFIL.pdf [Diakses 13 Juni 2021].

- Jayakarta, M. (2020). *Analisis Dinamika Keterlibatan Hizbullah Dalam Konflik Suriah Pasca Pemilu Parlemen Lebanon 2018*. [Online] Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Dalam: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50048/1/MUHAMMAD%20JAYAKARTA.FISIP.pdf> [Diakses 15 Juni 2021].
- Karabatak, Z. (2019). *The U.S. finally released military aid to Lebanon*. [online] Dalam: <https://www.washingtonpost.com/politics/> [Diakses 17 Juni 2021].
- Ceicdata.com. (2020). *Lebanon Penanaman Modal Asing*. [online]. Dalam: <https://www.ceicdata.com/id/indicator/lebanon/foreign-direct-investment> [Diakses 12 Oktober 2021].
- Luckham, R. dan Kirk, T. (2020). The Two Faces of Security in Hybrid Political Orders: A Framework for Analysis and Research. *Stability International Journal of Security & Development*, [online] 2(2), 44. Dalam: DOI: <http://doi.org/10.5334/sta.cf> [Diakses 18 Juni 2021].
- Mansour-ille, D. (2021). *Lebanon's Politics of Disarray*. [online] Rusi. Dalam: <https://www.wired-gov.net/wg/news.nsf/articles/Lebanons+Politics+of+Disarray+12052021100500?open> [Diakses 12 Juni 2021].
- Malaeb, B. (2018). *State fragility in Lebanon: Proximate causes and sources of resilience*. [online] International Group Center. Dalam: <https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2018/04/Lebanon-country-report.pdf> [Diakses 1 Agustus 2021].
- Muttaqin, Z. (2021). Ideologi: Faktor Konflik dan Kegagalan Timur Tengah. *Nation State: Journal of International Studies*, [Online] 1(2), 198-207. Dalam: <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=900022&val=14172&title=Ideologi%20Faktor%20Konflik%20dan%20Kegagalan%20Timur%20Tengah>. [Diakses 20 Juni 2021].
- Mroue, W. (2020). *Lebanon's Amal and Hezbollah: The Past in the Present?*. [Online] The London School of Economic and Political Science. Dalam: <https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/03/18/lebanons-amal-and-hezbollah-the-past-in-the-present/> [Diakses 20 Juni 2021].
- Nerguizian, A. (2017). *The Lebanese armed forces, hezbollah, and military legitimacy*. [Online] Burke Chair in Strategy. Dalam: <https://www.csis.org/analysis/lebanese-armed-forces-hezbollah-and-military-legitimacy> [Diakses 21 Juni 2021].
- Nerguzian, A. (2018). *The Lebanese Armed Forces and Hizbullah: Military Dualism in Post War Lebanon*. [Online] Carnegie Middle East Center. Dalam: <https://carnegie-mec.org/2018/10/30/lebanese-armed-forces-and-hezbollah-military-dualism-in-post-war-lebanon-pub-77598> [Diakses 21 Juni 2021].

- Nerguizian, A. (2020). *Moral Leadership and the Lebanese Military*. [Online] Carnegie Middle East Center. Dalam: <https://carnegie-mec.org/diwan/80433> [Diakses 21 Juni 2021].
- Nerguizian, A. (2021). *The Five Wildcards of Lebanese Military Capability Development*. [Online] Tawazun. Dalam: <http://tawazun.smartestsuite.com/english/blog1.php?id=591-tw> [Diakses 22 Juni 2021].
- Orion, A. (2019). *Time to Change Course on the UN's Lebanon Policy*. [Online] The Washington Institute for Near East policy. Dalam: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/time-change-course-un-lebanon-policy> [Diakses 24 Juni 2021].
- Robinson, K. (2020). *What Is Hezbollah?*. [Online] Council on Foreign Relation. Dalam: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6HMP5j7MrXWJ:https://www.cfr.org/background/what-hezbollah+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id> [Diakses 26 Juni 2021].
- Samaan, J. (2018). *The Lebanese Armed Forces: Operationally Effective, Strategically Weak?*, [Online] ISPI. Dalam: <https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/lebanese-armed-forces-operationally-effective-strategically-weak-19128> [Diakses 1 Juli 2021].
- Sarkis, J. (2020). *US support to the Lebanese Armed Forces benefits regional security and stability*. [Online] Mei@75. Dalam: <https://www.mei.edu/publications/us-support-lebanese-armed-forces-benefits-regional-security-and-stability> [Diakses 3 Juli 2021].
- Satgas Yonmek XXIII-L, (2018). *Laporan Pelaksanaan Tugas Satgas Kontingen Garuda XVIII/UNIFIL TA. 2017-2018*. [Diakses 3 Juli 2021]
- Setyowati, A. (2017). *Ideologi Islam, Barat, dan Amerika (potret sejarah global kepentingan dalam pertarungan diskursif)*. [online] 1(1). Dalam: <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20200430115830.pdf> [Diakses 4 Juli 2021]
- Shaikh, S. (2018). *Hezbollah's Missiles and Rockets*. [Online] Center for Strategic and International Studies. Dalam: <https://www.csis.org/analysis/hezbollahs-missiles-and-rockets>. [Diakses 4 Juli 2021].
- Sicca, P. (2020a). Pemerintah Lebanon Perangi Korupsi, Jaminan yang Diharapkan Komunitas Internasional. *Kompas*, [Online]. Dalam: <https://www.kompas.com/global/read/2020/08/13/054228170/pemerintah-lebanon-perangi-korupsi-jaminan-yang-diharapkan-komunitas?page=all> [Diakses 8 Juli 2021].
- Sicca, S. Pradita (2020b). Akankah Presiden Perancis Mengembalikan Kedudukan Kolonial di Lebanon?. *Kompas*, [Online]. Dalam:

<https://www.kompas.com/global/read/2020/08/09/131900370/akankah-presiden-perancis-mengembalikan-kedudukan-kolonial-di-lebanon?page=all> [Diakses 7 Juli 2021].

Staff, T. (2020). *Hezbollah commandos' video threatens Israel, warns of 'disaster from the north*. [Online] The times of israel. Dalam: <https://www.timesofisrael.com/hezbollah-commandos-video-threatens-israel-warns-of-disaster-from-the-north/> [Diakses 8 Juli 2021].

Syakir, A. (2019). *"Sekte Islam Sunni Di Lebanon (Pengaruh Islam Sunni Terhadap Perkembangan Politik Di Lebanon Tahun 1964 - 2008 M)*. [online] Digital Library UIN Surabaya. Dalam: <http://digilib.uinsby.ac.id/33980/> [Diakses 18 Juli 2021].

Valeriano, B. (2003). *The Steps to Rivalry: Power Politics and Rivalry Formation*. [online] Research Gate. Dalam: https://www.researchgate.net/publication/34984355_The_Steps_to_Rivalry_Power_Politics_and_Rivalry_Formation [Diakses 22 Agustus 2021].

tradingeconomics.com. (2019). *Lebanon Military Expenditure*. [Online] Dalam: <https://tradingeconomics.com/lebanon/military-expenditure> [Diakses 10 Juli 2021]